

BAB I

PENDAHULUAN

1. 1. Latar Belakang

Padatnya pertumbuhan penduduk menyebabkan meningkatnya tingkat pencemaran air karena dengan meningkatnya pertumbuhan penduduk juga berarti meningkatnya produksi limbah rumah tangga seperti deterjen, tinja dan sampah organik. Pencemaran air dapat terlihat dari fisiknya yang terjadi perubahan warna, keruh dan bau dan biasanya berasal dari kegiatan yang dilakukan berulang (Sholichin, 2021). Air yang sudah tercemar dapat merusak lingkungan dan membahayakan kesehatan masyarakat. Dampak negatif yang disebabkan oleh bakteri yang berasal dari air limbah yaitu berbagai penyakit infeksi, seperti diare, kolera, tifus dan hepatitis (Dahruji et al., 2016). Hal itu terjadi karena belum adanya sarana sanitasi yang cukup untuk menanggulangi penyebaran penyakit menular melalui air dan tinja.

Sarana sanitasi yang baik bisa mengurangi penyebaran penyakit, menjaga kelestarian lingkungan dan berdampak positif pada ekosistem, serta, sanitasi yang baik merupakan salah satu pilar dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (Lumunon et al., 2021). Pemerintah perlu mengantisipasi pengolahan limbah agar limbah yang dihasilkan tidak merugikan masyarakat dan merusak lingkungan. Contohnya seperti program sanitasi berbasis masyarakat di Kabupaten Tulungagung yang dirancang untuk meningkatkan kondisi sanitasi dengan melibatkan partisipatif aktif masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemeliharaan fasilitas sanitasi. Program ini bertujuan untuk meningkatkan

akses sanitasi yang layak dan berkelanjutan bagi masyarakat, terutama di daerah padat penduduk (Rachmaddianto, 2015). Namun, terdapat berbagai cara lain untuk mengendalikan pencemaran sektor domestik atau sumber utama limbah rumah tangga yang berpotensi mencemari lingkungan jika tidak dikelola dengan baik, salah satunya dengan pembangunan proyek IPAL.

Proyek IPAL adalah suatu sistem yang dirancang untuk mengolah air limbah domestik agar kualitasnya tidak merusak lingkungan dan menjaga kualitas air tanah (Heston, 2017). Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) adalah sistem yang dirancang untuk mengolah air limbah sebelum dibuang ke lingkungan. Pembangunan IPAL merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mengatasi masalah pencemaran air dan meningkatkan kualitas sanitasi. Pemerintah pusat dan daerah memiliki peran yang penting dalam perencanaan, pembangunan dan pengelolaan IPAL serta bertanggung jawab untuk menetapkan kebijakan terkait dengan pengelolaan limbah. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 22 Tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup yang menyebutkan perlu adanya upaya untuk melestarikan lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran atau kerusakan hidup. Pada skala nasional, Proyek IPAL sendiri sudah dilakukan di 3 daerah di Indonesia, yaitu di Kota Makassar, Kota Pekanbaru dan Kota Jambi. Proyek tersebut termasuk dalam program *Metropolitan Sanitation Management Investment Project* (MSMIP) dan mencakup pembangunan IPAL skala perkotaan.

Adapun contoh proyek IPAL yang telah dilakukan, seperti, di Kota Pekanbaru. Proyek ini berlangsung dari tahun 2020 dan diresmikan oleh Presiden

Joko Widodo pada 31 Mei 2024. Proyek ini bertujuan untuk mengolah air limbah domestik menjadi air bersih yang dapat dikembalikan ke waduk. Dengan kapasitas sebanyak 8.000 m³ per hari dan jaringan sambungan rumah dapat mencapai sebanyak 11.000 sambungan (Laksono, 2023). Contoh selanjutnya berasal dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Proyek ini dibangun sejak 2019 sampai dengan 2023, menghabiskan anggaran sebesar 1,2 triliun. IPAL Losari terletak di Jalan Metro Tanjung Bunga, Kecamatan Tamalate, memiliki kapasitas 16.000 m³ air limbah per hari dan diharapkan dapat melayani 46.000 sambungan rumah. Tujuan proyek ini, meningkatkan kualitas air limbah, menjaga kebersihan lingkungan dan kesehatan masyarakat, serta mendukung pembangunan kota yang berkelanjutan (Isman, 2024). Selain daerah-daerah yang sudah disebutkan sebelumnya, proyek IPAL juga sedang dilakukan di Kota Jambi.

Proyek Instalansi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) di Kota Jambi yang dilaksanakan di 2 Kecamatan, yaitu Kecamatan Jambi Timur dan Kecamatan Pasar. Pada Kecamatan Jambi Timur terdapat 9 Kelurahan yang menjadi lokasi penggalian pipa, yaitu: Kelurahan Talang Banjar, Kelurahan Budiman, Kelurahan Sulanjana, Kelurahan Rajawali, Kelurahan Kasang, Kelurahan Kasang Jaya dan Kelurahan Tanjung Sari (Priyanti, 2023). Proyek ini bertujuan untuk meningkatkan upaya fungsi lingkungan hidup, melindungi kualitas air tanah dan mengendalikan pembuangan air limbah domestik. Hal itu tertuang dalam Peraturan Daerah No. 13 Tahun 2015 mengenai pengelolaan air limbah domestik atau permukiman. Terdapat 3 perusahaan yang bertanggungjawab atas penggalian proyek, antara lain: PT. Adhi Karya yang bertanggung jawab atas pembangunan jaringan perpipaan di

wilayah Pasar, PT. Waskita Karya bertanggung jawab atas pembangunan jaringan perpipaan di wilayah Kecamatan Jambi Timur dan PT. Brantas Abhipraya bertanggung Jawab atas pembangunan IPAL di wilayah Kecamatan Jambi Timur (Akhmad, 2023). Dengan total dana anggaran sebesar 608 Miliar Rupiah, proyek ini didanai melalui pinjaman dari *Asian Development Bank* (ADB) sebesar 401 Miliar Rupiah dan Belanja Negara (APBN) sebesar 207 Miliar Rupiah (Darma, 2024).

Pengembangan IPAL terpusat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah No. 13 Tahun 2015 mengenai pengelolaan air limbah domestik atau permukiman menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota. Dalam proyek IPAL yang beroperasi di Kota Jambi terkhusus di Kecamatan Jambi Timur terdapat beberapa instansi yang terlibat antara lain; Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jambi (BPPW) dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Jambi yang bertanggung jawab dalam sektor atas pengelolaan pembangunan proyek. Sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah, BPPW memiliki peran yang sangat vital dalam pelaksanaan proyek-proyek strategis nasional di bidang sanitasi. BPPW di bawah naungan Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian PUPR yang memiliki tugas pokok melaksanakan pembangunan, pengawasan, serta pembinaan teknis infrastruktur permukiman di wilayah kerjanya.

Pada Proyek IPAL Kota Jambi, BPPW bertugas memastikan bahwa setiap tahap pelaksanaan proyek yang dimulai dari perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi hingga pengendalian proyek berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan. Fungsi BPPW mencakup koordinasi lintas sektor, pelaksanaan pembangunan, monitoring dan evaluasi serta fasilitasi keberlanjutan proyek, termasuk penyiapan kelembagaan pengelola dan serah terima aset kepada pemerintah daerah. Peran BPPW dalam proyek IPAL tidak hanya bersifat administratif, namun juga substantif. Keberhasilan atau kegagalan proyek sangat ditentukan oleh efektivitas pelaksanaan yang dijalankan oleh BPPW, termasuk bagaimana BPPW mampu mengendalikan proses pembangunan melalui pengawasan teknis dan koordinasi lintas lembaga. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji sejauh mana tugas dan fungsi BPPW berjalan secara optimal dalam Proyek IPAL ini, serta bagaimana urgensi perannya berkontribusi pada peningkatan kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat di Kota Jambi.

Pelaksanaan Proyek IPAL dimulai pada tahun 2021 dan menimbulkan banyak permasalahan terutama gangguan lalu lintas akibat lambatnya penyelesaian proyek galian pipa. Proyek IPAL awalnya dijanjikan akan selesai di akhir tahun 2023, namun, hingga di tahun 2024 akhir, proyek tersebut masih belum selesai di kawasan Jalan Brigjen Katamsa dan Jalan Raden Pamuk (*Proyek IPAL Di Kota Jambi Dipastikan Rampung Bulan Ini*, n.d.). Penggalan pipa di beberapa kawasan yang padat sering menyebabkan kemacetan. Kemacetan dan penyempitan jalan yang terjadi akibat proyek ini menimbulkan ketidaknyamanan bagi masyarakat, mengakibatkan kesulitan akses dan meningkatnya waktu tempuh harian (Annisa et al., 2024).

Selain kemacetan, terdapat juga kecelakaan lalu lintas yang memakan korban sehingga korban terperosok ke dalam galian lubang yang berada di tengah

jalan sehingga korban dan kendaraannya masuk ke dalam lubang proyek diperkirakan kedalamannya kurang lebih sedalam 5 meter yang berada di tengah jalan (Sanjaya, 2023). Upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Jambi untuk menanggulangi berbagai problematika lalu lintas yang disebabkan oleh proses pembangunan proyek IPAL, salah satunya dengan perbaikan infrastruktur jalan yang rusak akibat proyek untuk meningkatkan kelancaran lalu lintas.

Pembahasan mengenai Proyek IPAL pada dasarnya menarik untuk dilakukan dikarenakan beberapa peneliti telah melakukan penelitian dengan topik terkait, diantaranya adalah; Pertama, sebuah penelitian yang dilakukan oleh Siko Fadil Muhamad, Fenti Prihatini Dance Tui, Yacob Noho Nani dengan penelitian yang berjudul “Strategi Kebijakan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik : Studi Kasus di Desa Tunggulo Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bone Bolango.” Yang membahas tentang Strategi kebijakan sistem pengelolaan air limbah domestik dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air limbah domestik di Desa Waitlo, Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango. Strategi ini memerlukan penanganan lintas sektoral, termasuk pemerintah desa, Balai BPPW (Pusat Prasarana Permukiman Daerah), Dinas PUPR, dan Bappeda. Partisipasi masyarakat sangat penting untuk perencanaan kebijakan, dan partisipasi publik—atau partisipasi publik dalam perumusan kebijakan publik—kurang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan karena respons pemerintah terhadap pengetahuan masyarakat kurang dan perlu ditingkatkan (Muhamad et al., 2023).

Selanjutnya, Penelitian yang dilakukan oleh Dwi Saputri, Fajar Marendra, Ahmad Tawfieurrahman Yuliansyah, Agus Prasetya yang berjudul “Evaluasi

Aspek Teknis dan Lingkungan IPAL Komunal di Kabupaten Sleman Yogyakarta.” Yang menjelaskan bahwasanya rekomendasi yang diberikan kepada pemerintah untuk mengoptimalkan pemanfaatan IPAL Komunal adalah sebagai berikut: (1). melakukan survei di wilayah di mana IPAL Komunal masih kurang digunakan dan mengidentifikasi kondisi dan potensi optimalisasinya berdasarkan kondisi geografi, sebaran rumah, dan kesiapan penduduknya, (2). menetapkan peraturan yang mewajibkan pemilik rumah untuk mengalirkan limbahnya ke IPAL Komunal di wilayah yang direkomendasikan dari hasil survei, (3). menyediakan layanan yang memungkinkan pemilik rumah untuk mengalirkan ke fasilitas IPAL Komunal, seperti kolam fitoremediasi atau wetland buatan (Saputri et al., 2021).

Penelitian selanjutnya datang dari Asmitha Anggraini, Ismail Rachman, Stefanus Sampe yang berjudul “Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Dalam Mengatasi Pencemaran Limbah Industri PT Delta Pasifik Indotuna di Kelurahan Girian Bawah Kota Bitung.” Memberi penjelasan mengenai kebijakan lingkungan perusahaan PT Delta Pasifik Indotuna di Kelurahan Girian Bawah Kota Bitung tentang pengelolaan air limbah industri melalui proses perencanaan produksi yang efektif. Ini akan memungkinkan pengurangan limbah industri dengan memanfaatkan IPAL. PT Delta Pasific Indotuna telah diberi sanksi karena pencemaran limbah oleh perusahaan tersebut. Sanksi ini diberikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bitung. Tidak ada tindakan pidana yang diambil oleh dinas tersebut terhadap perusahaan, dan sanksi tersebut hanyalah tindakan jera (Anggraini et al., 2021).

Berikutnya, penelitian yang dilakukan oleh Rahmadi, Agung Prawoto, Diana Sari, Kaheta Mandasari, Maizul Hardinas, M Rizki, Nia Ramadani, Muhammad Firdaus yang berjudul “Strategi komunikasi lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru pada pengerjaan proyek IPAL dalam menanggapi keluhan Masyarakat Kota Pekanbaru.” Membahas mengenai metode komunikasi yang digunakan oleh pemerintah Kota Pekanbaru untuk menanggapi keluhan masyarakat tentang proyek pembangunan IPAL. Proyek ini cukup mengganggu aktivitas masyarakat Kota Pekanbaru dan menyebabkan banyak masalah yang dikeluhkan oleh masyarakat, termasuk kemacetan, ekonomi, kerusakan jalan, kerusakan rumah, dan masalah lingkungan akibat debu dan banjir. Oleh karena itu, pemerintah harus menetapkan metode untuk menanggapi keluhan masyarakat. Namun demikian, ada banyak kekurangan dalam implementasinya. Banyak masyarakat yang tidak tahu bagaimana melaporkan keluhan seperti debu, jalan berlumpur, dan banjir selama pembangunan proyek, sehingga mereka harus hidup berdampingan dengan debu dan banjir setiap tahun (Rahmadi et al., 2022)

Terakhir, penelitian ini diteliti oleh Herlina Sattuang, Kahar Mustari, M. Syahrul dengan judul “*The Effectiveness Analysis of Domestic Wastewater Treatment Plants Case Study of Batikite Resort Jeneponto.*” Yang menguraikan bahwa penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas IPAL domestik yang dibangun berdasarkan hasil penelitian sebelumnya. Metode yang digunakan adalah eksperimen, di mana sampel air limbah diambil sebelum dan setelah proses pengolahan untuk mengukur parameter kualitas air seperti BOD, TSS, amoniak, fosfat, dan minyak. Penelitian ini juga menekankan pentingnya pengolahan air

limbah untuk mencegah pencemaran lingkungan, terutama karena lokasi resort yang berdekatan dengan pantai. Diperlukan penambahan bahan seperti arang aktif untuk menghilangkan bau dari *effluent* yang dihasilkan. Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam pengelolaan limbah domestik di sektor pariwisata, yang merupakan salah satu sektor penting dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia (Sattuang et al., 2020)

Berdasarkan uraian dari penelitian terdahulu, pembeda dari penelitian sebelumnya terlihat dari penelitian terdahulu memiliki fokus kepada Strategi Kebijakan Pengelolaan Proyek IPAL, Strategi Komunikasi Pemerintah, dan Efektivitas Proyek IPAL. Pada penelitian yang sekarang, peneliti ingin meneliti lebih mendalam terkait dengan Manajemen Pemerintahan terkhusus indikator Pengendalian dalam tata kelola proyek IPAL di Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi. Pengendalian pemerintahan mengacu pada pengawasan alur kerjasama atau koordinasi antar instansi pemerintahan dan menyelidiki faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan proyek IPAL.

Pengendalian adalah proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi agar supaya pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya (Sondang, 1987). Pengendalian merupakan strategi untuk menghindari penyimpangan-penyimpangan juga pengawasan terhadap aktivitas proyek. Dengan pelaksanaan pengendalian secara intensif, diharapkan dapat mengurangi dan meminimalkan berbagai masalah, seperti, masalah penyalahgunaan wewenang, kebocoran, pemborosan, atau efisiensi keuangan dan kekayaan negara serta berbagai bentuk penyelewengan

lainnya. Dengan kata lain, melalui penngendalian diharapkan dapat ditegakkan disiplin kerja di lingkungan pemerintah dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. (Taufiq, 2018).

Berbagai urgensi yang telah dipaparkan pada paragraf-paragraf sebelumnya menjadi dasar atas isu ini diangkat. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini akan berfokus tentang "**Analisis Pengendalian Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jambi dalam Proyek Instalasi Pengolahan Air Limbah Kota Jambi**".

1. 2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengendalian dari Balai Prasarana Permukiman Wilayah dalam melaksanakan proyek IPAL yang berlokasi di Kota Jambi?
2. Apa solusi dari kendala yang terdapat dalam pengerjaan proyek IPAL di Kota Jambi?

1. 3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengidentifikasi pengendalian oleh Balai Prasarana Permukiman Wilayah dalam proyek IPAL Kota Jambi
2. Untuk menemukan solusi dari kendala yang terdapat dalam proses pembangunan proyek IPAL.

1. 4. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini, diharapkan dapat memberikan berbagai manfaat di segala aspek, manfaat tersebut, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi penghubung teori dengan praktik pemerintahan, melalui kajian pelaksanaan proyek IPAL yang memperlihatkan sejauh mana teori-teori manajemen dan pengendalian dapat diterapkan dalam konteks kebijakan publik.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan agar bisa memberikan masukan bagi pemerintah dalam peningkatan kualitas manajemen pemerintah dalam melaksanakan proyek. Penulis berharap penelitian dapat memberikan wawasan dan gambaran bagi kalangan akademisi dan para *stakeholder* yang berpartisipasi dalam proyek IPAL untuk meningkatkan mutu hidup masyarakat.

1. 5. Landasan Teori

Landasan teori menjadi dasar yang kuat dalam penelitian yang akan dilakukan dan menjadi acuan untuk menemukan masalah di lapangan. Menurut Sardar Ziauddin (2016). Landasan Teori adalah suatu sistem konsep yang abstrak yang dipakai untuk mengidentifikasi hubungan dari suatu konsep. Teori ini dipakai untuk memahami fenomena yang terjadi dan juga untuk konsep dasar dari sebuah penelitian sosial. Oleh karena itu, pada penelitian ini penulis menjabarkan beberapa landasan teori yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan.

1. 5. 1. Manajemen Pemerintahan

Manajemen adalah proses dimana memulai untuk mengkoordinasi sesuatu. Faktor penting dalam manajemen adalah bagaimana kita dapat mencapai suatu tujuan, bagaimana kita menyeimbangkan tujuan- tujuan yang sekiranya bertentangan, dengan manajemen pula, bagaimana kita membuat pekerjaan menjadi efektif dan tentunya efisien (Hendrawati, 2015, p. 5). Fungsi-fungsi manajemen dengan singkatam *POAC*, yaitu: 1) Perencanaan (*Planning*), 2) Pengorganisasian (*Organizing*), 3) Penggerakam (*Actuating*), 4) Pengendalian/Pengawasan (*Controlling*) (Terry & Rue, 2019). Konsep dasar dari manajemen pemerintahan tidak lain adalah manajemen itu sendiri. Dari beberapa penjelasan di atas, dapat dilihat bahwa di dalam manajemen pemerintahan juga menyoroti proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat. Manajemen Pemerintahan adalah suatu proses kegiatan melakukan “tata kelola” atau pengelolaan pemerintahan oleh Penguasa atau penyelenggara pemerintahan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan, yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat. (Supriyanto, 2009).

Manajemen pemerintahan dapat diartikan sebagai metode penerapan kebijakan publik secara terorganisir. Oleh karena itu, tata kelola berfokus pada alat manajemen, pengetahuan teknis, dan keterampilan yang dapat digunakan untuk menerjemahkan gagasan dan pedoman menjadi tindakan (Istianto, 2011). Manajemen pada intinya adalah bagaimana menciptakan *effectiveness* usaha (“*doing right things*”) secara *efficient* (“*doing things right*”) dan produktif, melalui

fungsi dan skill tertentu, dalam rangka mencapai tujuan organisasional yang telah ditetapkan (Ndraha, 2003, p. 159). Fungsi-fungsi manajemen pemerintahan yang dimaksud Taliziduhu Ndraha dalam bukunya yang berjudul *Kybernology* (Ilmu Pemerintahan Baru) Jilid 1, antara lain:

a. Perencanaan Pemerintahan

Perencanaan merupakan tahap awal yang dilakukan untuk menjelaskan tujuan organisasi, menyusun langkah-langkah untuk mencapai tujuannya dan mengembangkan strategi untuk mencapainya. Pemerintah sendiri mempunyai wewenang dan kemampuan untuk mengelola, melaksanakan program-program pembangunan yang berkaitan dengan fungsinya sebagai ‘pelayanan publik’ (Soares et al., 2015). Melalui perencanaan yang matang, pemerintah dapat menentukan arah pembangunan, mengalokasikan sumber daya secara efisien dan memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. Dalam menyusun rencana, pemerintah wajib mempertimbangkan berbagai faktor, seperti, kondisi sosial, ekonomi dan lingkungan agar rencana yang akan dibuat bersifat realistis, fleksibel dan tepat.

Salah satu proyek yang mencerminkan komitmen pemerintah dalam menjaga lingkungan adalah dengan pembangunan IPAL. Perencanaan pemerintah dalam konteks proyek IPAL dapat melibatkan aspek-aspek penting yang harus diperhatikan yaitu dengan melakukan riset lebih mendalam mengenai kebutuhan IPAL di suatu wilayah termasuk identifikasi sumber pencemaran, kapasitas limbah dan kondisi lingkungan. Suksesnya manajemen

proyek IPAL dapat dilihat dari perencanaannya yang tepat sasaran dan sesuai dengan target yang telah ditentukan.

b. Pengorganisasian sumber-sumber pemerintahan

Organisasi merupakan suatu sistem kerjasama yang dilakukan lebih dari satu orang. Organisasi sebagai sistem formal dari hubungan aturan-aturan dan tugas serta keterkaitan otoritas yang mengontrol tentang cara orang bekerja sama dan memanfaatkan sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi (Saefrudin, 2017). Pengorganisasian menurut Terry merupakan kegiatan dasar dari manajemen dilaksanakan untuk mengatur seluruh sumber-sumber yang dibutuhkan termasuk unsur manusia, sehingga pekerjaan dapat diselesaikan dengan sukses. Realisasi (implementasi) langkah-langkah tersebut memerlukan sumber daya dari alam, manusia dan benda. Sumber daya harus diorganisasikan agar bisa dipakai sebelum digunakan. Pengorganisasian sumber daya pemerintah yang baik akan memastikan proyek berjalan lancar, tepat waktu, dan sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan.

Adapun aspek-aspek penting dalam pengorganisasian sumber daya pemerintahan, antara lain; sumber daya manusia, dana yang dialokasikan, peralatan yang diperlukan untuk pelaksanaan proyek dan data-data mengenai kondisi lingkungan, sosial, ekonomi di wilayah proyek. Dengan mengoptimalkan sumber daya manusia, anggaran, teknologi, dan informasi, pemerintah dapat memastikan bahwa proyek IPAL berjalan lancar dan memberikan manfaat yang maksimal.

c. Penggunaan sumber-sumber pemerintahan

Penggunaan sumber pemerintahan dalam manajemen pemerintahan adalah sebuah proses yang dinamis dan saling terkait. Dengan mengoptimalkan semua sumber daya ini, pemerintah dapat menciptakan sistem yang lebih responsif, transparan, dan akuntabel, sehingga mampu untuk mendorong sumber daya pemerintah untuk mencapai hasil yang telah ditentukan (Suharyadi & Insani, 2016).

d. Kontrol Pemerintahan

Istilah pengawasan, pengendalian dan pengontrolan secara umum diartikan sama yaitu pengawasan. Dalam ilmu manajemen yang bersumber dari literatur barat tidak dikenal adanya fungsi pengendalian, *controlling* diartikan sebagai pengawasan dalam fungsi manajemen. Bahwa fungsi pengendalian itu sebenarnya ada dan menempati tempat yang penting, tetapi pada umumnya disenafaskan dengan fungsi pengawasan dan tercakup dalam pengertian *controlling* (Sururama & Amalia, 2020). Pengawasan merupakan salah satu pilar penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh kebijakan dan program pemerintah berjalan sesuai dengan rencana, efektif, efisien, dan akuntabel. Pengawasan juga berfungsi sebagai mekanisme pengendalian untuk mencegah terjadinya penyimpangan, korupsi, dan penyalahgunaan wewenang.

1. 5. 2. Pengawasan

Pengawasan merupakan proses kegiatan untuk memantau, mengukur, dan melakukan perbaikan atas pelaksanaan pekerjaan dan bertujuan untuk menghindari

penyimpangan atau penyelewengan, baik pada anggaran, proses, maupun kewenangan (Djadjuli, 2018). Pengawasan adalah fungsi manajemen yang berupa mengadakan penilaian, bila perlu mengadakan koreksi sehingga apa yang dilakukan dapat diarahkan ke jalan yang benar dengan maksud tercapainya tujuan yang telah ditetapkan semula. Pengawasan terdiri dari fase sebagai berikut : menetapkan standar, mengadakan penilaian (evaluasi), mengadakan tindakan perbaikan (Asvi, 2017). Pengawasan bisa diuraikan sebagai proses dalam memberikan jaminan bahwa sejumlah tujuan yang ditetapkan pada organisasi dalam manajemen bisa terwujud (Romauli Situmeang, 2017).

Kontrol atau pengawasan dimasukdkan "*to exercise restraint or direction over; dominate; command*" (Ndraha, 2003, p. 194). Dengan demikian pengawasan memiliki arti strategis bagi suatu organisasi. Pengawasan yang dimaksudkan disini adalah kontrol terhadap pemerintah, baik yang berasal dari dalam organisasi maupun dari luar. Pengawasan dapat dilakukan oleh siapa saja yang berkepentingan terhadap organisasi yang dalam hal ini pemerintah, pengawasan yang berasal dari dalam organisasi (*built-in-control, internal control dan self control*) dapat dilakukan oleh atasan terhadap bawahan.,Pengawasan merupakan aktivitas penting dalam memastikan segala sesuatu berjalan sesuai rencana dan mencapai tujuan yang ditetapkan. Dalam berbagai bidang, terutama dalam pengelolaan proyek, pengawasan memiliki peran yang sangat krusial. Secara obyektif, pengawasan dapat dikategorikan menjadi dua (2), yaitu:

Pengawasan langsung, merupakan suatu bentuk pengawasan di mana pihak yang berwenang secara langsung terlibat dan mengamati pelaksanaan suatu

kegiatan atau pekerjaan. Pengawasan ini dilakukan secara tatap muka dan melibatkan interaksi langsung antara pengawas dengan yang diawasi. (Fajriah et al., 2019). Pengawasan langsung ini dapat berupa: a) Inspeksi langsung, adalah pengawasan yang dilakukan secara langsung oleh atasan terhadap bawahan pada saat kegiatan dilakukan, b) Observasi ditempat, adalah pengawasan yang dilakukan oleh atasan terhadap bawahan sebelum kegiatan dilaksanakan, c) Laporan ditempat, adalah laporan yang disampaikan bawahan secara langsung pada saat atasan mengadakan inspeksi langsung kegiatan dilaksanakan. (Sururama & Amalia, 2020) dan Pengawasan Tidak Langsung didefinisikan sebagai pengawasan yang dilakukan oleh aparat/pimpinan organisasi tanpa mendatangi obyek yang diawasi/diperiksa (Sujamto, 1986). Pengawasan dari jarak jauh melalui laporan yang disampaikan oleh bawahan berbentuk: a) Laporan tertulis, adalah laporan yang disampaikan oleh bawahan kepada atasan dalam bentuk laporan kegiatan yang dibukukan, yang dilaporkan secara berkala, b) Laporan lisan, adalah laporan yang disampaikan bawahan secara langsung kepada atasan mengenai kendala yang dihadapi pada saat melakukan kegiatan, baik berupa penyimpangan maupun saran-saran. (Sururama & Amalia, 2020)

a. Teknik Pengawasan

Teknik pengawasan termasuk kedalam aspek manajemen dan pengawasan karena untuk menjalankan pengawasan butuh ditentukannya teknik supaya pengawasan bisa berjalan efektif dan efisien. Berikut adalah teknik pengawasan yang dikemukakan oleh (Ndraha, 2003, pp. 195–208) yaitu;

- i. Pengendalian atau *directing*, merupakan *the continuous task of making decisions and embodying them in spesific and general orders and instructions and serving as the leader of the interprise*. Pengawasan, pengawasan disini dipandang bagian dari kontrol yaitu kontrol sebelum terjadi.
- ii. Pemantauan atau *monitoring*, merupakan proses perekaman fakta yang kemudian diolah dengan teknik analisa data menjadi informasi yang dibutuhkan.
- iii. Evaluasi, merupakan proses perbandingan antara standar dengan fakta dan analisis hasilnya.
- iv. Audit, merupakan *an official examination and verification of account and records*.
- v. Supervisi, dapat diartikan sebagai kontrol dari atasan terhadap bawahan.
- vi. Appraisal, yang diartikan sebagai *the act of estimating or judging the nature or value of some one or some thing*.

1. 5. 3. Pengendalian

Konsep pengendalian terkait dengan pengawasan, karena bagian dari proses pengukuran kinerja. Pengendalian merupakan sebuah proses dari mengendalikan, membandingkan dan mengoreksi performa kinerja. Menurut Robbins dan Coulter, Pengendalian merupakan proses dimana pemimpin mengetahui bahwa organisasi atau instansi telah mencapai tujuannya atau tidak (Robbins & Coulter, 2012). Mengukur standar pelaksanaan kinerja organisasi yang dicapai dengan kinerja yang seharusnya dicapai (Sugiyanto, 2016).

1. Tipe Pengendalian

Pengendalian adalah suatu kerangka kerja yang dirancang untuk membantu organisasi maupun instansi mencapai tujuannya dengan cara mengidentifikasi, mengukur, mengelola dan memonitor kinerja operasionalnya. Pengendalian merujuk kepada serangkaian prosedur, kebijakan dan metode yang digunakan untuk memastikan bahwa sumber daya organisasi digunakan secara efisien. Meskipun antara pengawasan dan pengendalian terdapat pemisahan definisi, namun fungsi pengendalian tidak terlepas dari lingkup pengawasan. Pengendalian memperlakukan pengawasan sebagai masalah dimensi, maka dari itu pengawasan tidak terlepas dari lingkup pengendalian. (Fauzan, 2024). Pengendalian melibatkan standar, yang didalamnya terdiri dari; kriteria, ukuran, patokan atau spesifikasi dari kegiatan. Sebuah standar dapat dikembangkan dengan cara sendiri-sendiri atau *unilateral*. Dalam fungsi pengawasan modern tidak hanya terpaku bagaimana menemukan kesalahan *auditi* sebanyak mungkin, akan tetapi menurut fungsi pengawasan diupayakan untuk lebih mengacu kepada aspek pemeriksaan dan konsultasi dan aspek efektivitas pengelolaan resiko, baik melalui:

a) Pengawasan pendahuluan atau umpan maju (*feedforward control*)

Pengawasan pendahuluan sering disebut juga dengan *steering control*, direncanakan untuk mengantisipasi masalah-masalah dari standar yang memungkinkan koreksi sebelum tahap suatu kegiatan tertentu diselesaikan. Pengendalian ini bisa disebut sebagai preventif control yaitu pengendalian yang dilakukan sebelum kegiatan dikerjakan dengan maksud tidak terjadi penyimpangan.

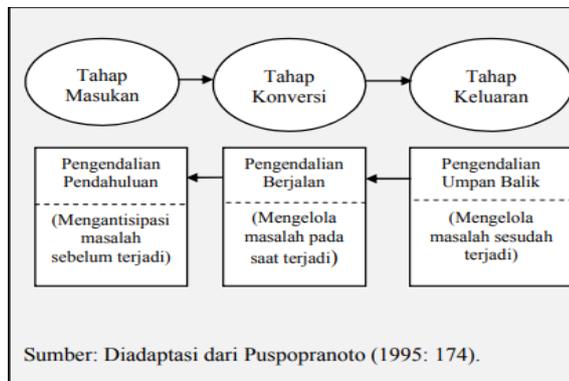
b) Pengendalian *concurrent*

Pengendalian *concurrent* atau berjalan adalah pengendalian yang dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan. Pengendalian ini dilakukan secara berlangsung dalam skala sebulan sekali atau satu kuartal sekali atau setahun sekali, bahkan dapat dilakukan secara mendadak. Pengendalian ini merupakan proses dimana aspek tertentu dari suatu prosedur harus disetujui dahulu sebelum kegiatan-kegiatan bisa dilakukan untuk menjamin ketepatan pelaksanaan suatu kegiatan. Pengendalian ini memberikan umpan balik segera kepada pemimpin mengenai bagaimana *input* diubah menjadi *output* sehingga pemimpin dapat memperbaiki masalah pada saat timbul. Pengendalian ini membuat pemimpin untuk memberikan reaksi secara cepat terhadap apapun sumber masalahnya.

c) Pengendalian umpan balik (*feedback control*)

Pengendalian umpan balik dikenal sebagai *past action control*, yaitu mengukur hasil-hasil dari suatu kegiatan yang telah diselesaikan. Pengendalian ini dilakukan setelah terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan dengan maksud agar tidak terjadi pengulangan kesalahan sehingga perencanaan berjalan dengan semestinya. Sebab-sebab penyimpangan dari rencana atau standar ditentukan dan penemuan diterapkam untuk kegiatan yang serupa di masa yang akan datang.

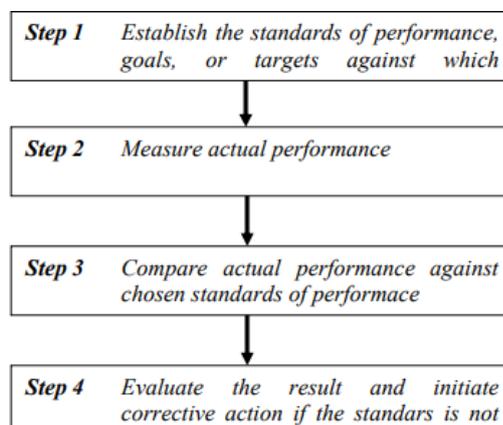
Gambar 1. 1 Tipe Pengendalian



2. Proses Pengendalian

Proses pengendalian merupakan serangkaian aktivitas yang terkait satu sama lain, tidak bersifat linear yang memantau pelaksanaan kinerja aktual sesuai dengan penetapan standar yang seharusnya dicapai. Proses pengendalian menunjukkan pentingnya sistem kontrol dalam instansi maupun organisasi yang direncang untuk memastikan kegiatan berjalan dengan lancar. Proses pengendalian meliputi empat langkah atau tahapan, yaitu; (1) Penetapan standar kinerja (*planning*); (2) Pengukuran kinerja aktual (*measuring*); (3) Membandingkan kinerja aktual dengan standar (*comparing*); dan (4) Pengambilan tindakan korektif (*evaluating*).

Gambar 1. 2 Proses Pengendalian



Sumber: George and Jones (2006: 497)

1) Penetapan standar (*planning*)

Menurut Robbins dan Coulter Penetapan standar merupakan langkah awal dalam proses pengendalian yang berfungsi sebagai tolak ukur penilaian kinerja aktual organisasi, proyek atau aktivitas. Urgensi dari penetapan standar yakni standar berfungsi untuk menjadi acuan bagi seluruh anggota untuk memahami ekspektasi yang diharapkan dari mereka dan membantu dalam mengidentifikasi hal yang perlu diperbaiki dan memberikan dasar untuk evaluasi kinerja. (Robbins & Coulter, 2012).

2) Pengukuran kinerja (*measuring*)

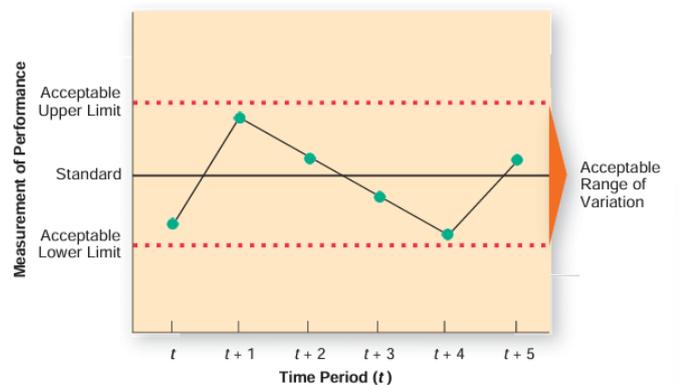
Pengukuran merupakan proses penting dalam memastikan bahwa semua aktivitas berjalan dengan yang telah direncanakan sebelumnya. Pengukuran memberikan gambaran jelas tentang kinerja instansi dalam proses yang sedang berlangsung untuk mencapai tujuannya. Aspek yang dicakup oleh indikator ini, seperti produktivitas, efisiensi dan kualitas *output*. Untuk mengetahui kinerja aktual yang telah dilakukan dapat melalui observasi langsung, laporan statistik, laporan lisan dan laporan tertulis. Dalam penerapan indikator pengukuran, atasan/manajer dapat mengidentifikasi bagian yang memerlukan perhatian lebih, serta mengukur efektivitas strategi yang direncanakan sebelumnya (Robbins & Coulter, 2012).

3) Membandingkan (*comparing*)

Indikator membandingkan dalam pengendalian merupakan langkah penting dalam mengevaluasi kinerja organisasi dengan cara membandingkan hasil aktual dengan standar yang telah ditetapkan (Robbins & Coulter, 2012). Membandingkan berfungsi untuk menganalisis faktor-faktor yang menjadi penghambat maupun

pendukung dalam proses kerja. Dengan memahami penyebab dari kesenjangan yang terjadi di lapangan, maka, atasan/manajer dapat mengambil langkah yang tepat untuk memperbaiki. Dengan demikian, indikator membandingkan dalam pengendalian manajemen bukan hanya sekadar alat untuk mengontrol, tetapi juga merupakan mekanisme strategis yang memungkinkan organisasi untuk belajar dan berkembang

Gambar 1.3 Membandingkan Kinerja



Sumber: Stephen P. Robbins and Mary Coulter (2012: 489)

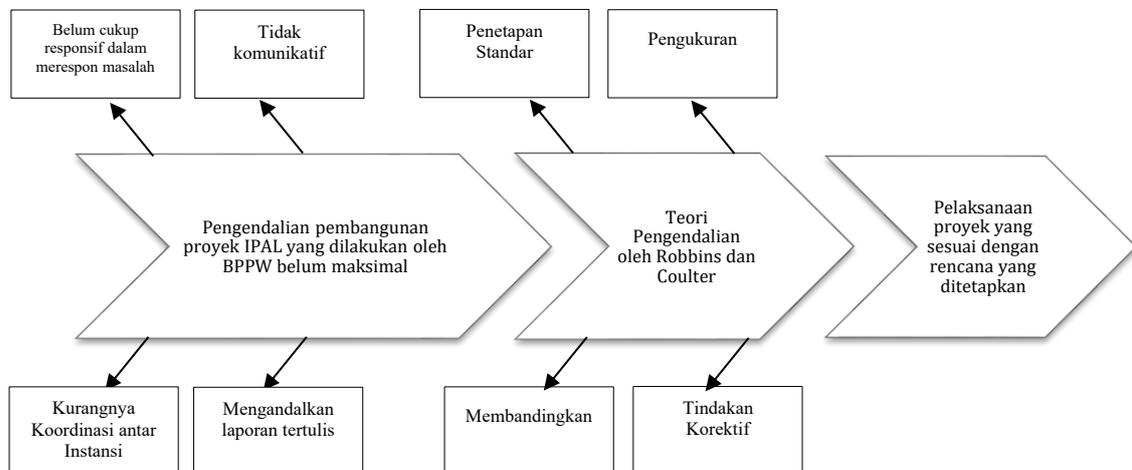
4) Pengambilan tindakan korektif (*evaluating*)

Melakukan tindakan dalam pengendalian manajemen merupakan langkah penting yang diambil setelah proses pengukuran dan perbandingan kinerja. Tindakan yang diambil setelah menganalisis kesenjangan yang terjadi di lapangan bisa berupa perbaikan proses, pelatihan tambahan atau penyesuaian alokasi sumber daya. Dalam melakukan tindakan memerlukan komunikasi yang jelas sesama anggota mengenai tindak lanjut yang akan diambil dalam memperbaiki kesenjangan yang ada. Keterlibatan antar anggota sangat penting karena mereka adalah pihak yang akan melaksanakan tindakan tersebut. Setelah tindakan telah dilaksanakan, tentu memerlukan evaluasi terhadap hasilnya, evaluasi ini akan memberikan umpan

balik yang berharga untuk perbaikan lebih lanjut. Melalui tindakan yang tepat dan terencana, organisasi dapat mengatasi tantangan yang dihadapi dan terus bergerak maju menuju pencapaian tujuan strategisnya.

1. 6. Kerangka Pikir

Kerangka berpikir adalah suatu sistematisasi pemikiran yang digunakan untuk menghubungkan variabel-variabel penelitian dan menjelaskan hubungan antara variabel-variabel tersebut. Pada penelitian mengenai pengendalian BPPW Jambi dalam mengelola proyek pembangunan IPAL, penulis menggunakan kerangka *fishbone* untuk mengidentifikasi penyebab dari suatu masalah.



1. 7. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode penelitian berhubungan erat dengan

prosedur, teknik, alat serta desain penelitian yang digunakan. Desain penelitian harus cocok dengan pendekatan penelitian yang dipilih. Pada kasus penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif untuk mendapatkan data mengenai pengendalian BPPW dalam proyek IPAL. Data dikumpulkan melalui berbagai teknik, seperti wawancara, observasi dan analisis dokumen.

1. 7. 1. Jenis Penelitian

Metode penelitian adalah proses yang terdiri dari langkah-langkah untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi, dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman mengenai suatu topik atau isu (Amruddin et al., 2022). Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu strategi pencarian makna, pengertian, konsep, karakteristik, gejala, simbol maupun deskripsi tentang suatu fenomena, fokus dan multimetode, bersifat alami dan holistik, mengutamakan kualitas, menggunakan beberapa cara, serta disajikan secara naratif dalam penelitian ilmiah (Sidiq & Choiri, 2019). Dalam penelitian ini, penelitian kualitatif dapat mengidentifikasi potensi permasalahan dan dapat menggali lebih dalam tentang perspektif, sistematika struktur yang terkait dengan proyek IPAL.

Jenis pendekatan penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan deskriptif. Pendekatan deskriptif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran yang akurat dan sistematis tentang suatu fenomena, peristiwa, atau variabel tertentu pada suatu waktu tertentu (Sidiq & Choiri, 2019). Pendekatan deskriptif sangat efektif dalam memberikan gambaran yang rinci mengenai suatu fenomena atau variabel saat penelitian dilakukan.

1. 7. 2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian berada di Kota Jambi, tepatnya pembangunan proyek IPAL tersebut tersebar di daerah Kecamatan Jambi Timur lebih tepatnya di Kelurahan Talang Banjar, Kelurahan Budiman, Kelurahan Sulanjana, Kelurahan Rajawali, Kelurahan Kasang, Kelurahan Kasang Jaya dan Kelurahan Tanjung Sari.

1. 7. 3. Fokus Penelitian

Peneliti akan berfokus kepada alur pengendalian pada pembangunan proyek IPAL oleh BPPW Jambi. Serta peneliti juga akan mengidentifikasi apa saja faktor penghambat maupun faktor pendukung yang menjadi tantangan yang dihadapi oleh Instansi.

1. 7. 4. Sumber Data

Sumber data merupakan elemen penting dalam penelitian yang menyediakan informasi yang dibutuhkan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Sumber data adalah bahan baku yang diolah menjadi informasi dan diolah menjadi temuan penelitian. Sumber data dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori utama

1.) Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang berharga untuk penelitian yang memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan informasi yang asli, akurat, dan mendalam. Data ini diperoleh dari sumber asli yaitu, informan ataupun responden yang terkait dengan penelitian (Rukhmana, 2021). Pada penelitian pengendalian pembangunan proyek IPAL ini, penulis akan melakukan survei, wawancara untuk mendapatkan data yang konkrit dan akurat yang akan dilakukan di BPPW Jambi.

2.) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (Rukhmana, 2021). Sumber data sekunder dapat ditemukan dalam arsip, skripsi, jurnal terkait penelitian, dan dokumen yang ada pada BPPW Jambi. Selain itu, data juga dapat diperoleh dari berita dan sumber lainnya yang relevan.

1. 7. 5. Teknik Penentuan Informan

Informan adalah individu yang memberikan informasi kepada peneliti dalam sebuah penelitian. Pemilihan informan yang tepat sangat penting untuk mendapatkan data yang akurat dan relevan dengan tujuan penelitian. Ada beberapa teknik yang dapat digunakan untuk menentukan Informan, namun teknik yang akan diterapkan yaitu Teknik *Purposive Sampling*. Teknik *purposive sampling* adalah teknik pemilihan informan dengan pertimbangan tertentu, yaitu berdasarkan karakteristik yang dianggap relevan dengan tujuan penelitian (Lenaini, 2021).

Peneliti juga menggunakan teknik *Snowball Sampling*. Teknik *Snowball Sampling* adalah metoda *sampling* di mana sampel diperoleh melalui proses bergulir dari satu responden ke responden yang lainnya, biasanya metoda ini digunakan untuk menjelaskan pola-pola sosial atau komunikasi (sosiometrik) suatu komunitas tertentu. Untuk dapat menemukan sampel yang sulit diakses, atau untuk memperoleh informasi dari responden mengenai permasalahan yang spesifik atau tidak jelas terlihat di dunia nyata, maka teknik *sampling snowball* merupakan salah satu cara yang dapat diandalkan dan sangat bermanfaat dalam menemukan responden yang dimaksud sebagai sasaran penelitian melalui keterkaitan hubungan

dalam suatu jaringan, sehingga tercapai jumlah sampel yang dibutuhkan. (Nurdiani, 2014)

Tabel 1. 1. Informan Penelitian

Keterangan	Status
PPK Sanitasi Balai Prasarana Permukiman Wilayah	Informan Kunci
Staff Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Jambi	Informan Pendukung
Asisten Pencegahan Maladministrasi Ombudsman RI Perwakilan Jambi	Informan Pendukung
Masyarakat terdampak Kelurahan Rajawali	Informan Pendukung

Sumber: data diolah peneliti

1. 7. 6. Teknik Pengumpulan Data

Pemilihan teknik pengumpulan data yang tepat merupakan faktor penting dalam penelitian untuk mendapatkan data yang akurat, relevan, dan dapat diandalkan. Djaman Satori dan Aan Komariah (2011) mendefinisikan teknik pengumpulan data sebagai prosedur sistematis untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ilmiah. Ini menunjukkan bahwa pengumpulan data harus dilakukan dengan cara yang terencana dan terstruktur agar hasilnya valid dan dapat diandalkan. Pemilihan teknik yang tepat tergantung pada jenis penelitian, tujuan penelitian, dan sifat data yang ingin dikumpulkan. Pada penelitian ini, peneliti melakukan teknik wawancara, studi kepustakaan, observasi dan dokumentasi untuk mengumpulkan data-data sebagai penguat penelitian.

1) Wawancara

Wawancara merupakan bentuk pengumpulan data yang paling sering digunakan dalam penelitian kualitatif. Keunggulan teknik ini mampu untuk memperoleh informasi dan mendalami informasi yang sudah ada dengan berbagai sudut pandang. Teknik ini bisa dilakukan secara tatap muka langsung maupun *online*. Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan percakapan langsung antara pewawancara dan responden, di mana pewawancara mengajukan pertanyaan dan responden memberikan jawaban (Noerhadi, 2016).

2) Observasi

Observasi adalah proses pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap suatu objek, peristiwa, atau fenomena. Ini merupakan metode pengumpulan data yang penting dalam berbagai bidang, termasuk ilmu pengetahuan, penelitian sosial, dan pendidikan. Observasi merupakan suatu pengamatan atau teknik yang dilakukan dengan mengadakan suatu pengamatan secara teliti serta pencatatan secara sistematis (Khaatimah & Wibawa, 2017).

3) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan proses pengumpulan, pengolahan, penyimpanan informasi dalam bentuk dokumen. Dokumen yang dimaksud dapat berupa teks, gambar, audio, video ataupun format lainnya. Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dokumentasi untuk membuktikan kebenaran untuk mendukung suatu fakta ataupun pernyataan.

1. 7. 7. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses yang dilakukan untuk mengolah, menata, memahami, dan mencari informasi penting dari kumpulan data yang diperoleh dalam penelitian. Miles dan Huberman mengklasifikasikan teknik analisis data kualitatif menjadi tiga kategori utama:

1) Reduksi Data

Banyaknya data yang dikumpulkan di lapangan, sehingga perlu dicatat secara rinci dan teliti. Semakin banyak waktu dihabiskan oleh seorang peneliti di lapangan, maka jumlah data yang diperlukan akan semakin kompleks dan rumit. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih informasi paling penting, memfokuskan pada hal-hal penting dan mencari tema serta polanya. (Fiantika et al., 2020)

2) Penyajian Data

Penyajian data pada penelitian kualitatif yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dengan teks yang bersifat naratif (Fiantika et al., 2020). Dengan adanya penyajian data, maka dapat mempermudah dan memahami apa yang terjadi. Selain itu, Miles dan Huberman dalam buku Feny mengusulkan agar data dapat ditampilkan dengan menggunakan grafik, matriks, *network* (jejaring kerja), dan *chart* selain dengan teks yang bersifat naratif (Fiantika et al., 2020)

3) Penarikan Kesimpulan

Menurut Miles dan Huberman dalam buku Feny, penarikan kesimpulan dan verifikasi merupakan langkah ketiga dalam analisis data penelitian kualitatif (Fiantika et al., 2020). Kesimpulan awal masih bersifat sementara dan dapat

dimodifikasi jika tidak ditemukan bukti substansial yang dapat mendukung tahap pengumpulan data selanjutnya. Namun, temuan pada tahap awal dianggap dapat dipercaya jika didukung oleh bukti yang dapat diandalkan dan konsisten ketika peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data lebih lanjut.

1. 7. 8. Keabsahan Data

Validasi data membantu data dan informasi yang diperoleh, menunjukkan bahwa semua data dan informasi telah diperoleh melalui observasi dan penelitian untuk memberikan informasi yang akurat. Data yang dilaporkan harus diverifikasi dan dianalisis. Peneliti menggunakan sumber data, metode, peneliti, dan teori untuk mengevaluasi validitas data. (Fiantika et al., 2020). Dalam penelitian ini, triangulasi yang akan digunakan yaitu triangulasi sumber data, yaitu dengan mengecek validitas data dengan menggunakan teknik pengumpulan dan sumber data seperti wawancara, observasi dan dokumentasi.